



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

NOMOR : 26/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI NOMOR : 23/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

Menimbang : bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2016 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

9. Peraturan.....

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab.012.329311/IV/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 25/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 477/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

2. Keputusan.....

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 10/Kpts/KPU-Kab.012.329311/VI/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 53/BA/KPU-Kab.Pati/IX/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2016 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR : 23/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.**
- KESATU** : Perubahan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Formulir Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 8 September 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,**

ttd

MUCH NASICH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
Kepala Sub Bagian Hukum



TRI WIJANARKO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR : 26/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI NOMOR : 23/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN
2017

**PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati. Penduduk Kabupaten Pati yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih dan bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati membuat keputusan yang mengatur mekanisme dan prosedur yang diterapkan dalam penyusunan Daftar Pemilih. Keputusan ini akan memudahkan penyelenggara pemilihan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati dalam menyusun dan menetapkan Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
2. Agar semua penduduk Kabupaten Pati yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih bisa terdaftar dalam Daftar Pemilih;
3. Agar masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memberi masukan dan saran untuk kesuksesan pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

C. PENGERTIAN UMUM

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pati untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. KPU Kabupaten Pati adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pati untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pati untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
10. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Pati, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pati.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Pati yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa/Kelurahan.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
17. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Pati yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
20. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pati.
21. Daftar Pemilih Tambahan, selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
22. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari pemilu atau pemilihan terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pati dengan dibantu oleh PPK dan PPS.

24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
25. Pencocokan dan Penelitian, selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Pati.
27. Hari adalah hari kalender.
28. Surat keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa pemilih telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan pemilihan.

D. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab.012.329311/IV/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 25/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016;

E. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas; dan
13. Aksesibilitas.

BAB II HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
3. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus memenuhi syarat :
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah / pernah kawin;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di wilayah Kabupaten Pati yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e);
 - e. dalam hal pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan Surat keterangan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati; dan
 - f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

5. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka Warga Negara Indonesia yang dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
6. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap Desa/Kelurahan.
7. Jika pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar Pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan.
8. Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6, diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih dan pada tempat tinggal pemilih tersebut ditempeli stiker Coklit.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.
2. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 1, berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap Desa/Kelurahan.
3. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 2, paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a. nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. nomor Kartu Keluarga;
 - d. nama lengkap;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal lahir;
 - g. umur;
 - h. jenis kelamin;
 - i. status perkawinan;
 - j. alamat jalan/dukuh;
 - k. Rukun Tetangga (RT);
 - l. Rukun Warga (RW); dan
 - m. jenis disabilitas.
4. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
5. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 4, dibuat dengan

menggunakan format excel dan/atau *Comma Separated Values (CSV)*.

6. Setelah menerima DP4 dari Pemerintah sebagaimana dimaksud angka 1, KPU melakukan analisis DP4.
7. KPU melakukan sinkronisasi data Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 6.
8. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 6, dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 7, kepada KPU Kabupaten Pati sebagai pertimbangan dalam melakukan pemutakhiran.
9. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 6, pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.
10. KPU Kabupaten Pati menyusun data Pemilih berdasarkan daftar Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan mempertimbangkan DP4, menggunakan formulir Model A-KWK setelah menerima hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8.
11. Penyusunan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 10, dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memerhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
12. KPU Kabupaten Pati menyampaikan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 10, kepada:
 - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*.
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.

B. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. KPU Kabupaten Pati dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.
2. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 2, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pati.
4. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 3, berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

5. PPDP melakukan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).
6. Kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, dengan cara :
 - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/ menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - k. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk;
7. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih pada formulir Model A.KWK :
 - a. belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - b. tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.
8. PPDP mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 pada formulir Model A.KWK, dengan memberikan keterangan :
 - a. tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - b. belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
9. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih.

10. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 6.
11. PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada PPS.
12. PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.
13. PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 5.
14. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 11, PPS menyusundaftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
15. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 14, dibantu oleh PPDP dengan membuat softcopy terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih, dan Pemilih yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
16. PPS menyusun daftar Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam angka 8, dengan menggunakan formulir Model A.C-KWK.
17. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 14 dengan menggunakan Model A1. 1-KWK.
18. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 16 dengan menggunakan formulir Model A.C1-KWK.
19. PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan angka 16 kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten Pati dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
20. PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 17 kepada PPK dan KPU Kabupaten Pati dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
21. Dalam hal PPS melakukan penyusunan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 17 dilakukan dalam bentuk hardcopy.
22. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 17 dan angka 18.

23. PPK menyusun rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam angka 22 dengan menggunakan formulir Model A1.2-KWK dan formulir Model A.C2-KWK.
24. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 23 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
25. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 24 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
26. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 25, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
27. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 26 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
28. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 27, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
29. Salinan formulir Model A1.2-KWK dan formulir Model A.C2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 23, disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Pati;
 - b. KPU Provinsi Jawa Tengah melalui KPU Kabupaten Pati;
 - c. Panwas Kecamatan;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
30. Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 29 huruf a, KPU Kabupaten Pati melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
31. KPU Kabupaten Pati menyusun rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam angka 30 dengan menggunakan formulir Model A1.3-KWK dan formulir Model A.C3-KWK.
32. Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 30 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pati.
33. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 32 dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Pati, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
34. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 33, PPK, Panwas Kabupaten Pati, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
35. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 34, harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

36. KPU Kabupaten Pati wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 35, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
37. KPU Kabupaten Pati menyampaikan salinan formulir Model A1.3-KWK dan formulir Model A.C3-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 31 kepada :
 - a. KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Panwas Kabupaten Pati;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati.
38. KPU Kabupaten Pati dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 30 menggunakan formulir Model A1-KWK.
39. KPU Kabupaten Pati menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 38 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan ;
 - b. pengumuman di sekretariat balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
40. KPU Kabupaten Pati menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 39, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Pati, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Pati.
41. KPU Kabupaten Pati melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati berdasarkan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 31.
42. Dalam hal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud pada angka 4, KPU Kabupaten Pati menemui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk meminta menerbitkan keterangan tersebut.
43. Dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tidak memberikan keterangan bahwa pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud pada angka 42, KPU Kabupaten Pati mencoret pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Pati dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, serta disaksikan oleh Panwas Kabupaten Pati.
44. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapatkan tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud pada angka 39.

C. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
2. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi :
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 3.
 - b. Pemilih sudah/ pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun.
 - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut.
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 3.
3. Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A1.A-KWK.
4. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, usulan perbaikan dapat diterima, PPS mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS menggunakan Model A2-KWK serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
6. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5, menggunakan formulir Model A3.1-KWK.
7. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada PPK.
8. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 7, menggunakan formulir Model A3.2-KWK.
9. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 8, dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

10. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 9, dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
11. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 10, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
12. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 11 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
13. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 12, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
14. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada :
 - a. KPU Kabupaten Pati;
 - b. KPU Provinsi Jawa Tengah melalui KPU Kabupaten Pati;
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
15. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 14 huruf a, KPU Kabupaten Pati melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
16. Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 15, dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pati.
17. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 16 dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Pati, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
18. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 16, PPK, Panwas Kabupaten Pati, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
19. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 18 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
20. KPU Kabupaten Pati wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 19, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
21. KPU Kabupaten Pati menyusun rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka 15 ke dalam formulir Model A3.3-KWK.
22. KPU Kabupaten Pati menyampaikan salinan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka 21 kepada :
 - a. KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Panwas Kabupaten Pati;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati.

23. KPU Kabupaten Pati menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 15 dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.
24. KPU Kabupaten Pati menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 23, kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai :
 - a. pengumuman di kantor desa/ kelurahan;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
25. KPU Kabupaten Pati menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 23, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Pati, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Pati.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. Salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf C angka 15 s.d angka 25, dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Kabupaten Pati.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan dirumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili; dan

- f. tertimpa bencana alam.
4. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2, disusun menggunakan formulir Model A4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
 6. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5, melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten Pati untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
 8. PPS atau KPU Kabupaten Pati berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5, angka 6 dan angka 7, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
 9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten Pati mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan :
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU kabupaten Pati
 10. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten Pati dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten Pati memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pati, PPK dan PPS.

5. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemasukan data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten Pati.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten Pati memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten Pati menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten Pati terhadap Pemutakhiran Data Pemilih sebelum penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Pati, dan penetapan rekapitulasi DPT oleh PPK dan KPU Kabupaten Pati.
3. KPU Kabupaten Pati wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten Pati.

BAB VII

KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Masyarakat, dan Rumah Sakit dilakukan oleh KPU Kabupaten Pati bersama PPK dan PPS setempat, dan berkoordinasi dengan petugas Rumah Tahanan Lembaga Masyarakat, dan Rumah Sakit tersebut.
2. Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan ketentuan Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan untuk membuktikan bahwa Pemilih yang bersangkutan adalah penduduk Kabupaten Pati.
3. Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih dapat menunjukkan Kartu Keluarga sebagai dasar Coklit.
4. KPU Kabupaten Pati bersama PPK dan PPS setempat mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memberikan keterangan tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

5. Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian wilayah Kabupaten Pati yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, pemutakhiran data Pemilih dilakukan oleh KPU Kabupaten Pati bersama PPK dan PPS dengan memerhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
6. Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian wilayah Kabupaten Pati yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ke tempat pengungsian KPU Kabupaten Pati melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian.
7. Rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf C angka 15 s.d angka 25 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan, serta proses pendistribusiannya.
8. Mengubah sebagian dan jenis formulir untuk keperluan pemutakhiran data dan daftar Pemilih, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
9. Pengadaan formulir Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 8, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

1. Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Pati, jajaran penyelenggara pemilihan, stakeholder dan masyarakat berkaitan dengan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

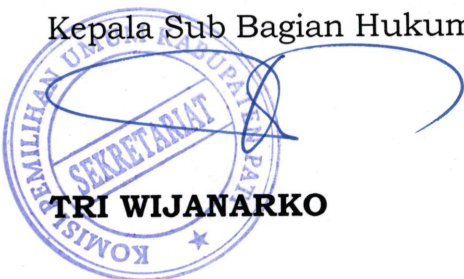
Ditetapkan di Pati
pada tanggal 8 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

ttd

MUCH NASICH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
Kepala Sub Bagian Hukum



TRI WIJANARKO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PATI
 NOMOR : 26/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR :
 23/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA
 DAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017

**JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017**

| NO | KODE | NAMA |
|---------|-----------|---|
| MODEL A | | |
| 1. | A-KWK | Data Pemilih |
| 2. | A.A-KWK | Data Pemilih Baru |
| 3. | A.A.1-KWK | Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih |
| 4. | A.A.2-KWK | Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian |
| 5- | A.B-KWK | Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran |
| 6- | A.C-KWK | Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik |
| 7- | A.C.1-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik Desa/Kelurahan |
| 8- | A.C.2-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik Kecamatan |
| 9- | A.C.3-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik Kabupaten/Kota |
| 10. | A.1-KWK | Daftar Pemilih Sementara |
| 11 | A.1.1-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Desa/Kelurahan |
| 12. | A.1.2-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kecamatan |
| 13. | A.1.3-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten |
| 14. | A.1.A-KWK | Formulir Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap DPS |
| 15. | A.2-KWK | Daftar Perubahan Pemilih Hasil Perbaikan |
| 16. | A.3-KWK | Daftar Pemilih Tetap |
| 17. | A.3.1-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Desa/Kelurahan |
| 18. | A.3.2-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan |
| 19. | A.3.3-KWK | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota |
| 20. | A.4-KWK | Daftar Pemilih Pindahan |
| 21. | A.5-KWK | Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan) |
| 22. | A.Tb-KWK | Daftar Pemilih Tambahan |

Ditetapkan di Pati
 Pada tanggal 8 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PATI

ttd

MUCH. NASICH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
 Kepala Sub Bagian Hukum



TRI WIJANARKO



Model A.A.1-KWK

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

| No | Nama Pemilih |
|-----|--------------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

Ditanda tangani di
Tanggal,

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)



Model AA.1-KWK

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

| No | Nama Pemilih |
|-----|--------------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

Ditanda tangani di
Tanggal,

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)

STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU;
2. Jenis dan Tahun Pemilihan;
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara;
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian;
5. Jumlah Keluarga;
6. Jumlah Pemilih;
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah;
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.



**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017**

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten Pati menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari :

Nama :
Alamat :

Alasan memberikan tanggapan/masukan karena :

- 1. Kesalahan data pemilih
- 2. Belum terdaftar
- 3.

Materi tanggapan dan masukan untuk dimasukkan kedalam Daftar Tanggapan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Nama Pemilih :
NO. KK :
NIK/Identitas lain :
Tempat/Tanggal Lahir :
Umur :
Status Perkawinan (B/S/P) :
Jenis Kelamin :
Alamat :
 Jalan/Dukuh :
 RT/RW :
Disabilitas :
NO. TPS :

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017

Tertanda Tahun
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemberi Masukan/tanggapan
(.....) (.....)

menunjukkan dan menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor, atau surat keterangan domisili.



**TANDA BUKTI
FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017**

Alasan memberikan tanggapan/masukan
untuk pemilih

Tertanda Tahun
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemberi Masukan/tanggapan
(.....) (.....)



SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017

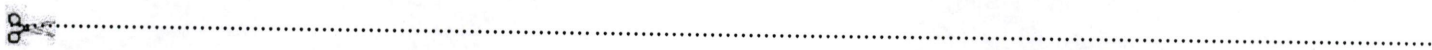
NO. KK :
NIK/ No.Paspor :
Nama :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/DPTb-1

1 TPS : 4 Kabupaten : Pati
2 Desa/Kelurahan : 5 Provinsi : Jawa Tengah
3 Kecamatan :

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1 TPS : Panitia Pemungutan Suara
2 Desa/Kel :
3 Kecamatan : Ketua,
4 Kabupaten : Pati
5 Provinsi : Jawa Tengah
(.....)



SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017

NO. KK :
NIK/ No.Paspor :
Nama :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/DPTb-1

1 TPS : 4 Kabupaten : Pati
2 Desa/Kelurahan : 5 Provinsi : Jawa Tengah
3 Kecamatan :

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

Dalam Negeri *)
1 TPS : Panitia Pemungutan Suara
2 Desa/Kel :
3 Kecamatan : Ketua,
4 Kabupaten : Pati
5 Provinsi : Jawa Tengah
(.....)



DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017

PROVINSI : Jawa Tengah
KABUPATEN : Pati

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :

| No | No KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan B/S/P | Jenis Kelamin L/P | Alamat | | | Disabilitas | ID_LKL |
|----|-------|-----|------|--------------|---------------|------|----------------------------|----------------------|-------------|----|----|-------------|--------|
| | | | | | | | | | Jalan/Dukuh | Rt | Rw | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |

keterangan disabilitas:

- 1: Tuna Daksa 4: Tuna Grahita B : Belum Kawin
2: Tuna Netra 5: Disabilitas lainnya S : Kawin
3: Tuna Rungu/Wicara P : Pernah Kawin

Keterangan Status perkawinan :



DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

: Jawa Tengah
: Pati

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

| No | No KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan B/S/P | Jenis Kelamin L/P | Alamat | | | Disabilitas | Keterangan |
|----|-------|-----|------|--------------|---------------|------|----------------------------|----------------------|-------------|----|----|-------------|------------|
| | | | | | | | | | Jalan/Dukuh | Rt | Rw | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |

keterangan disabilitas:

- 1: Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Ditetapkan di, Tanggal,,,

PPDP

(.....)



DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017

PROVINSI : Jawa Tengah
KABUPATEN : Pati

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

| No | No KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan B/S/P | Jenis Kelamin L/P | Alamat | | | Disabilitas | ID_LKL | STS |
|----|-------|-----|------|--------------|---------------|------|----------------------------|----------------------|-------------|----|----|-------------|--------|-----|
| | | | | | | | | | Jalan/Dukuh | Rt | Rw | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | |

keterangan disabilitas:

- 1: Tuna Daksa
- 2: Tuna Netra
- 3: Tuna Rungu/Wicara
- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Keterangan STS:

- B : Pemilih baru
- U : Ubah data
- 1 : Meninggal
- 2 : Ganda
- Hal ... dari ...
- 3 : Dibawah Umur
- 4 : Pindah Domisili
- 5 : Tidak Dikenal
- 6 : TNI

Ditetapkan di, Tanggal,,,

PPS

- 7 : Polri
- 8 : Hilang ingatan
- 9 : Hak Pilih Dicabut
- 10 : Bukan Penduduk

(.....)



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017

PROVINSI : Jawa Tengah
KABUPATEN/KOTA : Pati

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

| No | No KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan B/S/P | Jenis Kelamin L/P | Alamat | | | Disabilitas | ID_LKL |
|----|-------|-----|------|--------------|---------------|------|-------------------------|-------------------|-------------|----|----|-------------|--------|
| | | | | | | | | | Jalan/Dukuh | Rt | Rw | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |

keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa
- 2: Tuna Netra
- 3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Hal ... dari ...

Ditetapkan di, Tanggal,,,,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI.....
Ketua

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017
OLEH PPS

A.1.1-KWK

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA : Pati

PROVINSI : Jawa Tengah

| No. | Nomor TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|-----|-----------|----------------|---|-----|------------|
| | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| | TOTAL | | | | |

.....

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

| | Nama | Tanda Tangan |
|------------|-------|--------------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017
OLEH PPK

A.1.2-KWK

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA : Pati

PROVINSI : Jawa Tengah

| No. | Nama Desa/Kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|-----|---------------------|------------|----------------|---|-----|------------|
| | | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |

catatan: 1) coret salah satu

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

| | Nama | Tanda Tangan |
|------------|-------|--------------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |
| 4. Anggota | | |
| 5. Anggota | | |



A.1.3-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN PATI
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN : Pati
PROVINSI : Jawa Tengah

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Desa/Kel | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|-----|----------------|--------------------|------------|----------------|---|-----|------------|
| | | | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | |

.....,

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Pati Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

| | Nama | Tanda Tangan |
|------------|-------|--------------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |
| 4. Anggota | | |
| 5. Anggota | | |



**DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017**

PROVINSI : Jawa Tengah
KABUPATEN : Pati

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

| No | No KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan B/S/P | Jenis Kelamin L/P | Alamat | | | Disabilitas | ID_LKL | STS |
|----|-------|-----|------|--------------|---------------|------|----------------------------|----------------------|-------------|----|----|-------------|--------|-----|
| | | | | | | | | | Jalan/Dukuh | Rt | Rw | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | |

keterangan disabilitas:

- 1: Tuna Daksa 5: Disabilitas lainnya
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara
4: Tuna Grahita

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan STS:

- B : Pemilih baru 3 : Dibawah Umur 7 : Polri
U : Ubah data 4 : Pindah Domisili 8 : Hilang ingatan
1 : Meninggal 5 : Tidak Dikenal 9 : Hak Pilih Dicabut
2 : Ganda 6 : TNI 10 : Bukan Penduduk

Hal ... dari ...

Ditetapkan di, Tanggal,,

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUAPTI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017
OLEH PPS

A.3.1-KWK

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN : Pati

PROVINSI : Jawa Tengah

| No. | Nomor TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|-----|-----------|----------------|---|-----|------------|
| | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| | TOTAL | | | | |

.....

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

| | Nama | Tanda Tangan |
|------------|-------|--------------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017
OLEH PPK

A.3.2-KWK

KECAMATAN :

KABUPATEN : Pati

PROVINSI : Jawa Tengah

| No. | Nama Desa/Kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|-----|---------------------|------------|----------------|---|-----|------------|
| | | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |

catatan: 1) coret salah satu

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

| | Nama | Tanda Tangan |
|------------|-------|--------------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |
| 4. Anggota | | |
| 5. Anggota | | |



A.3.3-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN PATI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN : Pati
PROVINSI : Jawa Tengah

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Desa/Kel | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|-----|----------------|-----------------|------------|----------------|---|-----|------------|
| | | | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | |

.....,

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Pati Tanggal
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

| | Nama | Tanda Tangan |
|------------|-------|--------------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |
| 4. Anggota | | |
| 5. Anggota | | |



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017

PROVINSI : Jawa Tengah
KABUPATEN : Pati

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

| No | No KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan B/S/P | Jenis Kelamin L/P | Alamat | | | Disabilitas | Keterangan |
|----|-------|-----|------|--------------|---------------|------|-------------------------|-------------------|-------------|----|----|-------------|------------|
| | | | | | | | | | Jalan/Dukuh | Rt | Rw | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |

keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Hal ... dari ...

Ditetapkan di, Tanggal,,

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017

PROVINSI : Jawa Tengah
KABUPATEN : Pati

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

| No | No KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan B/S/P | Jenis Kelamin L/P | Alamat | | | Disabilitas | Keterangan |
|----|-------|-----|------|--------------|---------------|------|----------------------------|----------------------|-------------|----|----|-------------|------------|
| | | | | | | | | | Jalan/Dukuh | Rt | Rw | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |

keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Hal ... dari ...

Ditetapkan di, Tanggal,,

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



A.C.2-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017
OLEH PPK

KECAMATAN :
KABUPATEN : Pati
PROVINSI : Jawa Tengah

| No. | NAMA DESA/KELURAHAN | JUMLAH TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|-----|---------------------|------------|----------------|---|-----|------------|
| | | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |

catatan: 1) coret salah satu

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

| | Nama | Tanda Tangan |
|------------|-------|--------------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |
| 4. Anggota | | |
| 5. Anggota | | |



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017
OLEH PPK

A.C.1-KWK

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : Pati
PROVINSI : Jawa Tengah

| No. | NAMA DESA | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|-----|-----------|----------------|---|-----|------------|
| | | L | P | L+P | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| | TOTAL | | | | |

catatan: 1) coret salah satu

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

| | Nama | Tanda Tangan |
|----|-------|--------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |



Model A.C-KWK

DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017

PROVINSI : Jawa Tengah
KABUPATEN : Pati

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

| No | No KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Status Perkawinan B/S/P | Jenis Kelamin L/P | Alamat | | | Disabilitas | Keterangan |
|----|-------|-----|------|--------------|---------------|------|----------------------------|----------------------|-------------|----|----|-------------|------------|
| | | | | | | | | | Jalan/Dukuh | Rt | Rw | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |

Ditetapkan di, Tanggal,,,

Ketua PPS

keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu/Wicara

Keterangan Status perkawinan :

- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas lainnya
- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Hal ... dari ...

(.....)